

## **BAB III**

### **TEMUAN DATA DAN ANALISA DATA**

#### **3.1 Temuan Data**

##### **3.1.1 Program Kerja**

Sesuai dengan implementasi UU No. 23 Tahun 2004, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya membentuk Puspaga Surabaya yang memiliki beberapa program kerja pada tahun 2022 dan 2023 untuk pencegahan KDRT diantaranya yaitu, Talkshow, Ngobras (Ngobrol Asyik), Live Instagram, Publikasi Komunikasi Informasi Edukasi melalui Media Cetak dan Elektronik, Kelas Parenting, Webinar, Kelas Pendampingan Calon Pengantin, dan Puspaga Balai RW.

Puspaga Balai RW dibentuk dengan berbagai tujuan positif, salah satunya sebagai upaya pencegahan terhadap KDRT. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut ini :

“Kalau program kerja kami untuk mencegah KDRT di tahun 2022 dan 2023 ya kurang lebihnya sama. Ada Talkshow dan Ngobras (Ngobrol Asyik) untuk menciptakan adanya dialog terbuka. Lalu setiap bulannya ada Live Instagram, Publikasi Komunikasi Informasi Edukasi melalui Media Cetak dan Elektronik, Webinar dengan pemateri. Kelas Parenting dan Kelas Catin juga ada. Bahkan kami menyediakan Puspaga Balai RW juga untuk masyarakat agar bisa mengedukasi masyarakat..”<sup>22</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh staff Bidang Perlindungan Perempuan Anak, Ratna Harum Kinanti, S.Psi pada wawancara berikut :

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

“Program yang utama ada Puspaga Balai RW, inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kekerasan terutama dalam rumah tangga..”<sup>23</sup>

Program Puspaga Balai RW sejak tahun 2022 hingga 2023 bahkan hingga saat ini pun masih berjalan. Namun, dalam pelaksanaan Puspaga Balai RW sendiri tidak ada program kerja khusus yang harus dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M., Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Program yang sedang kita jalankan sampai saat ini hanya Puspaga Balai RW. Kalau untuk program kerja khusus dari Puspaga Balai RW sendiri tidak ada..”<sup>24</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Tidak ada program kerja lain, ya hanya Puspaga Balai RW saja untuk saat ini..”<sup>25</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu bernama Ruces Indriyati di RW IV Wonokromo dalam wawancara berikut :

“Yang saya tau ada Puspaga Balai RW disini, kegiatannya pun beragam. Tapi yang pasti saya tahu disini bisa konsultasi terkait masalah apapun yang ada di keluarga..”<sup>26</sup>

Puspaga Balai RW di kelurahan Wonokromo telah dilaksanakan selama dua (2) tahun. Pada awal dimulainya Puspaga Balai RW, program tersebut tersedia pada hari selasa dan kamis pukul 15.00-17.00 saja, namun kini mulai dari bulan oktober 2023 Puspaga

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ratna pada 3 Januari 2024

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ruces pada 29 Desember 20223

Balai RW resmi tersedia setiap hari mulai dari jam 15.00-17.00. Hal ini disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Untuk awal diperkenalkannya program Puspaga Balai RW itu tahun 2022. Pada saat itu kami diberi arahan untuk menyediakan layanan Puspaga Balai RW hanya dihari selasa dan kamis pukul 15.00 sampai 17.00. Tapi sekarang sudah resmi setiap harinya ada. Dan kalau memang dibutuhkan diluar jam operasional kami, kami pun selalu siap..”<sup>27</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu bernama Sophie di RW IV Wonokromo dalam wawancara berikut :

“Berdasarkan yang saya tahu, tahun 2022 sampai 2023 awal itu hanya di selasa dan kamis. Tapi sekarang sudah ditambah lagi jadi setiap hari dibuka..”<sup>28</sup>

### 3.1.2 Tim Pelaksana Tugas

Satuan khusus Puspaga dalam pencegahan KDRT di Puspaga Surabaya terdapat 2 tingkat, yaitu untuk tingkat Puspaga Kota dan juga Puspaga Balai RW. Dari kedua (2) tingkat tersebut pun berbeda pula tim yang melaksanakan. Terdapat standar untuk jumlah dari satuan khusus Puspaga tingkat Kota dan Puspaga Balai RW, diantaranya :

Tabel 3.  
Standar Pelaksanaan Puspaga Balai RW

Tingkat	Jumlah	Rincian
Puspaga Tingkat Kota	20 orang	5 Konselor, 2 Psikolog Dinas, dan 13 Psikolog Volunteer Puspaga Surabaya.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

<sup>28</sup> Wawancara dengan Sophie pada 29 Desember 2023

Puspaga Balai RW	6 orang	Fasilitator Puspaga Balai RW (Relawan PKBM Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan, Kader PKK/KSH, Karang Taruna, Mahasiswa, dan Kader/Fasilitator RW
------------------	---------	---

Sumber data sekunder: Hasil analisa

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. pada wawancara berikut ini :

“Untuk satuan khusus yang dimaksud mungkin ada pada jumlah petugas Puspaga sendiri, dan jumlahnya pun berbeda dari tingkat Kota dan Puspaga Balai RW. Di tingkat kota sendiri totalnya 20 orang, sedangkan di tingkat Balai RW kurang lebih 6 orang.”<sup>29</sup>

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Fasilitator RW

IV Wonokromo, Sri'ah pada wawancara berikut ini :

“Untuk total keseluruhan yang berjaga di Puspaga Balai RW tidak tentu, bergantung dengan situasi dan kondisi. Tetapi biasanya ada kurang lebih 4 orang yang berjaga. Biasanya dari Fasilitator Balai RW, anggota KSH, Mahasiswa magang, dan kader-kader. Terkadang memang kita tidak bisa memaksa kalau ada keperluan lainnya (dirumah), karena rata-rata kan juga ibu rumah tangga. Tapi sejauh ini seluruh anggota yang memang memiliki tugas di Puspaga Balai RW selalu aktif turut berpartisipasi kalau memang ada kegiatan..”<sup>30</sup>

Dalam hal ini peneliti menemukan perbedaan, dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan

<sup>29</sup> Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

Perempuan dan Anak dan juga yang ada di realita yang disampaikan oleh Fasilitator RW.

### 3.1.3 Proses Pelaksanaan

Salah satu langkah preventif dari DP3APPKB Kota Surabaya dalam mencegah KDRT dengan menyediakan layanan konseling di Puspaga Surabaya, yang hingga saat ini Puspaga sudah tersebar hingga tingkat RW. Layanan Puspaga yang tersedia di antaranya Pembelajaran anak dan keluarga yang mencakup kelas parenting umum, ABK, kelas pendampingan calon pengantin, serta konseling anak dan keluarga. Melalui wawancara dengan Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P., kita dapat melihat bagaimana lembaga ini dapat beroperasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama, DP3APPKB melalui Puspaga Kota Surabaya mengutamakan pencegahan melalui program Puspaga Balai RW. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut:

“Puspaga Surabaya sendiri telah mengambil langkah proaktif untuk mencegah kasus KDRT dengan cara menyediakan layanan konseling. Nah, menariknya saat ini Puspaga sudah memperluas cakupannya sampai ke tingkat RW. Sehingga masyarakat dapat berkonsultasi dengan lebih mudah dan cepat. Tidak hanya konseling terkait dengan pencegahan KDRT saja, tapi bisa juga konseling terkait anak dan juga keluarga. Upaya inilah yang mencerminkan dedikasi Puspaga Surabaya untuk memberikan dukungan dalam mencegah KDRT serta kelanjutan layanan hingga tingkat RW. Kalau untuk penanganan, bisa ke UPTD, kami memberikan bantuan berupa pendampingan psikologis.”<sup>31</sup>

“..Fokus utama kita adalah untuk pencegahannya, sehingga dalam Puspaga Balai RW memang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentunya mengenai ilmu dasar dari pencegahan KDRT itu sendiri, seperti halnya terkait dengan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

definisi, ciri-ciri, serta apa yang harus dilakukan apabila ada indikasi tersebut..”<sup>32</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Staff Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut :

“Untuk mencegah adanya kasus KDRT, bisa melalui Puspaga Balai RW. Karena setiap Balai RW terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan KDRT tentunya. Dan disitu juga masyarakat bisa melakukan konseling atau konsultasi terkait dengan masalah yang ada di keluarganya. Sehingga, para Fasilitator juga mengetahui apabila dinilai terdapat indikasi-indikasi terkait dengan KDRT dan hal tersebut bisa dicegah.”<sup>33</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Langkah pencegahan KDRT di RW IV Wonokromo sendiri biasanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal dasar terlebih dahulu, seperti halnya definisi, ciri-ciri, dan apa saja bentuk dari KDRT itu sendiri. Nah, karena sekarang ada Puspaga, maka sosialisasi ini dilakukan melalui Puspaga Balai RW.”

Dalam hal ini, Puspaga Surabaya melaksanakan programnya melalui dua (2) cara inti yaitu Sosialisasi dan juga Edukasi. Sosialisasi yang dilaksanakan Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT melalui berbagai kegiatan baik secara luring maupun daring meliputi Kelas Parenting yang dilaksanakan pada kegiatan Puspaga Balai RW, KIE Infografis terkait pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang dapat diakses melalui media sosial instagram puspaga.sby. Hal tersebut juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Adanya Puspaga Balai RW ini sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat, baik mengenai programnya juga terkait pencegahan KDRTnya. Kami

---

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

memperkenalkan adanya Puspaga Balai RW ini melalui berbagai pertemuan-pertemuan warga, misalnya PKK, Arisan, dan kegiatan bersama lainnya.”<sup>34</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu di RW IV Wonokromo bernama Emi, dalam wawancara berikut :

“Saya mengetahui adanya program Puspaga Balai RW ini melalui sosialisasi pada saat ada pertemuan Arisan. Disana juga dijelaskan bahwa program dari Puspaga Surabaya tidak hanya Puspaga Balai RW melainkan banyak program lain yang juga mendukung pencegahan KDRT seperti yang ada di Instagramnya Puspaga..”<sup>35</sup>



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Puspaga Balai RW  
Sumber data sekunder : Dokumen Puspaga Balai RW IV Wonokromo

Selain sosialisasi, terdapat edukasi bagi staff Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya melalui pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Edukasi terkait layanan yang akan diberikan. Selain itu SDM Tim Puspaga Surabaya juga mengikuti Bimbingan Teknis dari Kemen PPA. Begitu juga untuk para Fasilitator tiap Balai RW. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Kalau Edukasi dari DP3APKB Surabaya kepada para fasilitator tentunya ada, tapi memang tidak semua anggota bisa ikut jadi hanya perwakilan saja. Pelatihan tersebut dikenal dengan nama *Training of Trainer* (ToT). Teknisnya

<sup>34</sup> Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

<sup>35</sup> Wawancara dengan Emi pada 29 Desember 2023

seperti seminar begitu, jadi para Fasilitator dibekali ilmu dasar beberapa materi yang disampaikan. Setiap ToT materinya berbeda-beda. Bisa pencegahan KDRT, bisa tentang anak, bisa juga tentang gender.”<sup>36</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Kalau kami para fasilitator pernah mengikuti ToT, jadi kami diberikan bekal juga terkait dengan ilmu mengenai pencegahan KDRT, kesetaraan gender, masalah anak, masalah keluarga dan masih banyak lagi lainnya. Total materi yang diberikan ada 9-13 materi. Setiap pertemuan berbeda materi yang disampaikan. Sehingga kami para fasilitator juga mengerti apabila memang ada yang berkonsultasi ke Balai RW..”<sup>37</sup>



Gambar 4. Kegiatan Training of Trainer (ToT)  
Sumber data sekunder : Dokumen Puspaga Surabaya

Proses edukasi pun dilakukan kepada masyarakat melalui Puspaga Balai RW, khususnya di RW IV Wonokromo. Edukasi dilakukan agar masyarakat paham tentang apa itu KDRT, bagaimana bentuk dan dampaknya terhadap korban serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya KDRT dalam keluarganya. Hal ini juga menjadi upaya untuk menghadapi norma budaya yang mendukung atau membenarkan KDRT, sehingga edukasi diharapkan dapat membantu memutuskan siklus budaya yang

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

mempertahankan kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Ketua RW IV

Wonokromo dalam wawancara berikut:

“..tentunya untuk langkah awal kita harus mengedukasi masyarakat terkait dengan apa itu KDRT, bagaimana bentuknya, lalu apa dampaknya terhadap korban dan juga hukuman kepada pelaku. Dalam Puspaga Balai RW tentunya kegiatan ini sudah kami laksanakan. Kita mengumpulkan warga untuk kita edukasi tentang hal tersebut. Walaupun memang belum semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk melakukannya. Sehingga terkait bagaimana hasilnya kita bisa melihat sambil berjalannya waktu..”<sup>38</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Fasilitator Balai RW IV

Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut:

“..ya sudah seharusnya kan memang untuk mencegah KDRT itu kita mestinya tau dulu terkait dengan ilmu dasar KDRT, seperti apa saja yang bisa disebut dengan KDRT dan tanda-tandanya itu bagaimana. Maka dari itu, kita sebagai Puspaga Balai RW memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ilmu dasar KDRT. Supaya masyarakat juga paham dan bisa mencegah hal itu terjadi..”<sup>39</sup>

Selain itu, Puspaga Balai RW pun juga aktif dalam mendukung program ini dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan bersama. Hal ini disampaikan oleh Fasilitator RW IV

Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Untuk mengisi waktu dan juga kegiatan di Puspaga Balai RW ini banyak kegiatannya, mulai dari kami ada kegiatan yang namanya “Sinau Bareng” lalu ada sosialisasi, ikut seminar dan lain sebagainya. Sehingga warga juga bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan kami..”<sup>40</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo,

Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

<sup>39</sup> Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

“Fokus utama kami dalam melaksanakan Puspaga Balai RW ini memang hanya untuk pencegahannya saja, apabila memang dirasa ada yang berkonsultasi dengan kami dan kami menilai ada indikasi baik itu kekerasan fisik atau verbal atau yang lainnya, maka kami akan bantu untuk meneruskan laporannya ke UPTD PPA yang khusus untuk menangani KDRT.”<sup>41</sup>

### 3.1.4 Proses Monitoring

DP3APPKB terhadap Puspaga Surabaya merangkul peran proaktif dalam menggerakkan perubahan positif di masyarakat melalui program pendidikan dan informasi. Program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu utama yang menjadi fokus DP3APPKB, termasuk pencegahan KDRT, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan diskusi, DP3APPKB membawahi Puspaga Surabaya membuka ruang dialog yang terbuka dan inklusif, memberikan wawasan mendalam tentang dampak dan solusi terkait isu-isu tersebut. Dengan menyediakan wawasan dan alat pengetahuan yang relevan, program-program ini menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang sadar, responsif, dan berdaya terhadap isu-isu kritis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

DP3APPKB Surabaya memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial di Kota Surabaya, menjalankan kontrol sosialnya dengan berbagai cara yang efektif. Selain itu, DP3APPKB juga bekerja sama dengan beberapa OPD terkait, NGO, dan CSR yang ada di Kota Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Staff Bidang

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023



mereka ada yang dapat info baru kita datangi dan tangani. Kalau gaada orang yang lapor lalu kita datangi ya kita ndak berani. Kalau jemput bolaya tidak bisa, kecuali kita sudah mendapat info atau pelaporan.”<sup>43</sup>

### 3.1.5 Sasaran dan Penanganan

Program pencegahan KDRT oleh DP3APPKB Kota Surabaya dirancang dengan fokus pada berbagai kelompok yang memiliki potensi menjadi korban KDRT atau terlibat dalam situasi yang dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Sasaran atau target dari program ini mencakup :

#### 1. Perempuan

Sebagai kelompok yang paling rentan terhadap KDRT, program ini memprioritaskan perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mencakup perempuan dewasa, remaja, dan anak-anak perempuan yang mungkin menghadapi resiko kekerasan dalam konteks keluarga atau hubungan intim.

#### 2. Anak-anak

Anak-anak seringkali menjadi sasaran KDRT atau menjadi saksi kekerasan di dalam rumah tangga. Program ini melibatkan upaya perlindungan dan pencegahan yang khusus untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak.

#### 3. Keluarga dan pasangan.

Mengingat KDRT sering terjadi dalam konteks hubungan keluarga atau antara pasangan, program ini menyoal keluarga dan pasangan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

sebagai unit yang mungkin memerlukan dukungan dalam mencegah dan mengatasi KDRT.

#### 4. Masyarakat Umum

Program ini juga menargetkan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang gejala, dampak, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh individu di dalam masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut :

“Program ini ditujukan untuk semua masyarakat khususnya Perempuan yang ada di Kota Surabaya dan kota lain yang mengikuti kegiatan Puspaga Surabaya.”<sup>44</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dan Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

“Untuk sasaran dan targetnya ya masyarakat, khususnya perempuan dan anak..”<sup>45</sup>

Dengan menyasar berbagai kelompok ini, program pencegahan KDRT oleh DP3APPKB Kota Surabaya bertujuan untuk menciptakan efek positif yang menyeluruh dalam masyarakat, mulai dari tingkat individu hingga komunitas.

Ketika seorang perempuan sebagai istri melakukan konseling kepada Puspaga Balai RW terkait adanya indikasi KDRT, Fasilitator langsung memulai serangkaian upaya responsif untuk memberikan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

<sup>45</sup> Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

bantuan dan perlindungan kepada korban. Terkait dengan hal ini begini pernyataan dari Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Kalau memang ada yang melakukan konseling/ melapor pada kami terkait dengan KDRT tentu saja kita akan merespons secepatnya. Untuk pertolongan pertama pastinya kita dampingi dan kita tenangkan terlebih dahulu korbannya. Apabila keadaannya sudah mulai kondusif dan bisa kami wawancara akan kami tanya bagaimana kronologi dan juga penyebabnya. Apabila tidak cukup berat kasusnya akan kami bantu untuk mendamaikan atau memberikan solusi. Tentu saja kami juga mengedukasi pelakunya terkait dengan apa yang telah dilakukannya dan bagaimana dampak serta resiko yang akan diterima.”<sup>46</sup>

Dalam hal ini sempat ditemukan terkait dengan kasus KDRT, namun adanya kasus ini sebelum hadir Puspaga Balai RW. Begini penjelasan dari Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Ansori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut :

“Kalau untuk pelaporan kasus memang sejauh berjalannya Puspaga Balai RW belum ada, tapi ada pelaporan sebelum itu. Kasusnya dari istri yang sering dibentak-bentak, kemudian sang istri melapor ke saya. Saya berusaha untuk meredakan kondisinya terlebih dahulu pasti. Setelah lebih kondusif baru saya edukasi pelakunya, dan saya juga menengahi masalah yang sedang terjadi serta menawarkan solusi untuk penyelesaiannya secara baik-baik. Kebetulan pada saat itu sang istri masih mau rujuk, akhirnya rujuk kembali. Namun, apabila pada saat itu sang istri memang tidak mau rujuk ya kami akan menghormati keputusannya dan mendampingi untuk proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh sang istri. Kalau seandainya ada Puspaga ya kami akan meneruskan laporan itu ke Puspaga tentunya, supaya sang korban dapat didampingi secara psikologis oleh pihak yang lebih profesional.”<sup>47</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“Sejauh ini belum ada laporan atau konseling. Kalau sekedar curhat-curhat ya ada beberapa kali, hanya terkait dengan masalah anak dan rumah. Tapi, kalau memang ada yang lapor atau melakukan konseling terkait dengan KDRT kami tentunya siap siaga menanggapi dan merespons. Apalagi kami kan perempuan, tentunya kami akan memberikan dukungan dan mendampingi secara psikologis untuk korbannya. Lantas kami teruskan laporan ini ke Pihak

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

<sup>47</sup> ibid

DP3APPKB Kota Surabaya yang lebih profesional dalam menangani masalah ini dan kami juga akan menjaga rahasia terkait informasi apapun yang diberikan oleh korban. Karena kami juga harus profesional dalam menjalankan tugas.<sup>48</sup>

Sedangkan, langkah pertama yang diambil oleh DP3APPKB Kota Surabaya ketika ada yang melapor terkait KDRT yaitu melakukan wawancara dengan korban untuk memahami dengan lebih mendalam konteks kasus KDRT yang korban alami. DP3APPKB juga menjunjung tinggi prinsip keamanan dan kerahasiaan, sehingga proses wawancara dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan empati

Setelah mengidentifikasi resiko dan kebutuhan spesifik korban, DP3APPKB memberikan dukungan konseling yang intensif. Para konselor yang terlatih secara khusus membantu korban untuk mengatasi trauma dan memberikan bimbingan terkait langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil. Selanjutnya, DP3APPKB bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk memastikan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Ini dapat melibatkan penerbitan surat perlindungan, pengawalan, atau tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut. Hal yang sama juga dilakukan apabila terdapat pelaporan yang korbannya adalah anak.

Selama proses ini, DP3APPKB juga memberikan informasi tentang hak-hak korban KDRT dan memberikan panduan terkait akses terhadap layanan medis, tempat perlindungan, atau bahkan keuangan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

yang mungkin diperlukan oleh korban. Seluruh upaya ini dilakukan dengan pendekatan holistik, mengakui bahwa mengatasi KDRT melibatkan berbagai aspek kehidupan korban. DP3APPKB Kota Surabaya juga berkomitmen untuk memberikan bantuan seoptimal mungkin guna mendukung pemulihan dan memberdayakan korban KDRT untuk dapat hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan. Setiap langkah yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan dan keamanan korban KDRT.

### 3.1.6 Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah Kota Surabaya, dalam rangka komitmen untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berdaya, memberikan dukungan substansial kepada DP3APPKB. Dukungan ini mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program Puspaga Balai RW, pembinaan sumber daya manusia, serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program secara optimal. Hal ini sesuai dengan isi buku petunjuk teknis Puspaga Balai RW sebagai berikut :

Tabel 4.  
Sarana dan Prasana Puspaga Balai RW

Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana Puspaga Balai RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ruang di Balai RW 2. Ruang pertemuan di Balai RW 3. Meja, Kursi 4. Papan Nama 5. X-Banner 6. Flyer 7. ID Card dan Rompi untuk petugas
----------------------	--

	8. Dokumen kerja 9. Screen dan LCD Projector 10. Laptop/Komputer dan Printer
Sumber Daya Anggaran	Sumber daya anggaran terdiri dari: a. APBD Kota Surabaya b. Dana Kelurahan c. Sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat
Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia/ tenaga layanan terdiri dari: a. Relawan PKBM, Kader PKK/KSH Kecamatan b. Satgas PPA, Kader PKK/KSH Kelurahan c. Kader/ Fasilitator Puspaga Balai RW d. Tenaga Layanan (Mahasiswa/ Psikolog Volunteer)

Sumber data sekunder: Hasil analisa

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara berikut:

“Terdapat Sarana dan Prasarana di Puspaga Kota Surabaya selain itu juga adanya dukungan anggaran terkait program kegiatan Puspaga Surabaya.”<sup>49</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut:

“Pemerintah Kota Surabaya melalui Puspaga telah memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT serta melalui UPTD PPA memberikan layanan penanganan jika terdapat korban (baik sebagai istri/anak/orang tua) yang melapor. Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelatihan dan bantuan kepada Perempuan yang mengalami KDRT.”<sup>50</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ratna Harum Kinanti, S.Psi dalam wawancara berikut:

<sup>49</sup> Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

<sup>50</sup> Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

“SDM Tim Puspaga Surabaya telah mendapat pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Edukasi terkait layanan Puspaga Surabaya. Selain itu SDM Tim Puspaga Surabaya juga mengikuti Bimbingan Teknis dari Kemen PPA.”<sup>51</sup>

Lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian, lembaga kesehatan pun juga menjalin kolaborasi yang erat dengan DP3APPKB. Mereka tidak hanya berperan sebagai mitra strategis tetapi juga memberikan dukungan teknis, informasi, dan koordinasi untuk memastikan bahwa upaya pencegahan KDRT dilakukan secara terkoordinasi dan holistik. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut:

“Dalam penanganan kasus KDRT, UPTD PPA berjejaring dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah Kota Surabaya terkait pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Selain itu, UPTD PPA juga berjejaring dengan Pihak Kepolisian terkait pendampingan hukum.”<sup>52</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“Oh tentu saja, kami juga berjejaring dengan puskesmas terdekat dan juga polsek Wonokromo. Sehingga, kalau memang ada kasus, kami juga bisa langsung membantu untuk menangani dan mengarahkan serta melakukan pendampingan juga terhadap korban.”<sup>53</sup>

Dari berbagai dukungan tersebut, respon masyarakat merupakan hal penting yang menjadi tujuan dari program pencegahan KDRT ini. Namun, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh Puspaga Surabaya dengan Puspaga Balai RW. Berikut pernyataan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ratna pada 3 Januari 2024

<sup>52</sup> Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan, Iswati, S. Si., M.A.P. dalam wawancara:

“Sejauh yang saya tau, yaa masyarakat merespon dengan baik dan antusias ya mbak. Terutama pada saat sosialisasi. Sehingga Puspaga Balai RW ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan..”<sup>54</sup>

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurul Fajaria, S.Psi dalam wawancara berikut:

“Oh.. respon masyarakat baik kok mbak..”<sup>55</sup>

Namun, nyatanya peneliti menemukan pernyataan yang berbeda yang disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo, Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“..sampai saat ini ya mbak, yang saya tau jarang ada orang yang datang untuk konsultasi atau bertanya terkait dengan permasalahan keluarga, terutama KDRT. Rata-rata orang tuh malu mbak, dan menganggap KDRT itu masalah pribadi dan juga aib. Sehingga susah bagi kami untuk mengetahui indikasi-indikasi yang dialami oleh warga..”<sup>56</sup>

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Sri'ah dalam wawancara berikut :

“..gapernah ada yang datang mbak. Kecuali memang ada kegiatan kayak edukasi atau sosialisasi tentang apa gitu yang mengundang warga. Tapi kalau untuk datang sendiri sangat amat jarang. Apalagi konsultasi masalah KDRT. Ya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di Indonesia ini masalah KDRT itu jadi hal yang tabu. Jadinya orang itu malu untuk datang berkonsultasi atau curhat-curhat. Belum lagi kalau tetangganya tau, nanti malah jadi bahan omongan atau gunjingan di lingkungannya..”<sup>57</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Fasilitator RW IV Wonokromo, Lia Kurniasari dalam wawancara berikut :

<sup>54</sup> Wawancara dengan Iswati pada 2 Januari 2024

<sup>55</sup> Wawancara dengan Nurul pada 3 Januari 2024

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan Sri'ah pada 28 Desember 2023

“..selalu sepi sih mbak, yaa jarang ada yang dateng untuk konsultasi gitu. Tapi kalau memang kita mengadakan kegiatan edukasi atau apa gitu kan orang pasti dateng karna kita undang. Saya pikir orang itu malu ya untuk konsultasi gitu, malu tetangganya tau atau gimana kan pastinya. Apalagi kalau konsultasi ke kami yang ibaratnya ya masih tetangga, karena lingkungannya kan dekat ya. Padahal dari kami sudah ada SOP untuk menjaga rahasia klien. Tentunya kami juga akan profesional pastinya ya. Saya rasa juga pengetahuan masyarakat itu kurang terkait dengan KDRT. Sehingga di Indonesia masih banyak keluarga yang mewajarkan KDRT, dan bahkan melindungi KDRT ibaratnya. Karena ya itu tadi, gamau konsultasi.”<sup>58</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh ibu-ibu di RW IV

Wonokromo bernama Emi, dalam wawancara berikut:

“Kalau saya ya mbak, selagi bisa diselesaikan sendiritentunya bakal menyelesaikan sendiri. Karena ya pastinya malu lah kalau sampe orang lain tau, apalagi kalau sekedar bertengkar dan adu omongan aja. Kecuali memang sampai ada KDRT gitu mungkin saya baru berani untuk bercerita atau konsultasi ke orang lain. Kalau ke tetangga kan sebenarnya ya malu, tapi kalau memang di Puspaga Balai RW kan orang-orangnya sudah ada pembekalan, ya mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk konsultasi ya..”<sup>59</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh ibu-ibu di RW IV

Wonokromo bernama Ruces dalam wawancara berikut:

“Kami itu sebetulnya mau kalau untuk konsultasi, cuma takutnya itu respon dari fasilitator ini kurang membantu mbak, jadinya ya kalau saya pribadi memilih untuk menyelesaikan sendiri ya masalah keluarga saya, terutama kalau sama suami..”<sup>60</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW IV Wonokromo,

Achmad Anshori, S.E., M.M. dalam wawancara berikut:

“..ya kalau berbicara tentang Puspaga Balai RW sendiri, dan menurut saya sendiri memang tidak ada respon dari masyarakat. Bukan konsultasi KDRT aja, segala sesuatu sih mbak. Jadi ya bisa dikatakan sudah diimplementasikan atau dilaksanakan tapi tidak terlaksana atau tidak ada respon balik dari masyarakat..”<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Wawancara dengan Lia pada 28 Desember 2023

<sup>59</sup> Wawancara dengan Emi pada 29 Desember 2023

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ruces pada 29 Desember 2023

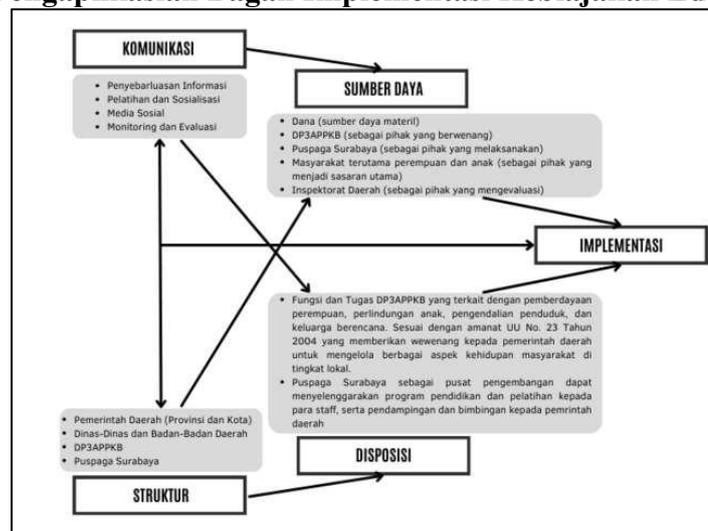
<sup>61</sup> Wawancara dengan Ansori pada 15 Desember 2023

Sejalan dengan upaya Puspaga Balai RW dalam menjalankan program pencegahan KDRT, sangat disayangkan bahwa ternyata didapat bahwa kurangnya dukungan dari masyarakat menjadi tantangan nyata. Tanpa partisipasi aktif dan kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat, keberlanjutan program ini mungkin akan terus terhambat.

### 3.2 Hasil Analisis Data

#### 3.2.1 Pemberdayaan ibu rumah tangga dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT oleh Puspaga sebagai upaya pencegahan KDRT

**Bagan 1.**  
**Pengaplikasian Bagan Implementasi Kebijakan Edward III**



Sumber: hasil analisa model implementasi George Edward III

#### a. Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi memiliki peran sentral yang tidak bisa diabaikan. Proses komunikasi menjadi alat utama untuk memastikan penyebaran informasi yang efektif mengenai kebijakan kepada para pemangku kebijakan, serta

membangun dukungan dari mereka. Kejelasan mengenai ukuran dan tujuan kebijakan perlu disampaikan secara tepat kepada para pelaksana. Beberapa bentuk komunikasi diantaranya:

1. Penyebarluasan Informasi kepada Staf Internal maupun Eksternal.

Proses penyebarluasan informasi mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT kepada para Staf Internal dan Eksternal dari DP3APPKB Kota Surabaya telah dilakukan. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda kepada staf internal dan juga eksternal. Untuk staf internal terdapat Bimbingan Teknis dari Kemen PPA, sedangkan staf eksternal terdapat *Training of Trainee* (ToT). Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator Penyebarluasan Informasi kepada Staf Internal maupun Eksternal pada implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sudah sesuai. Indikasi dari hal tersebut adalah para staf DP3APPKB Kota Surabaya dan Fasilitator RW IV Wonokromo mengetahui tentang UU PKDRT ini.

2. Pelatihan dan Sosialisasi

Dalam hal pelatihan dan sosialisasi peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena pelatihan terhadap Fasilitator Balai RW sudah berjalan, namun kegiatan tersebut tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pengetahuan yang dimiliki oleh para fasilitator. Pelatihan hanya dilakukan

beberapa kali saja pada awal, tidak dijalankan secara rutin untuk terus mengasah pengetahuan dari para kader. Begitu juga dengan sosialisasi. Sosialisasi terus dilakukan, namun tidak terdapat respon balik yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini peneliti pahami karena alasan terhalang oleh budaya yang sudah berjalan di Indonesia.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan KDRT ini hal yang tabu dan memalukan, sehingga mereka tidak mau melakukan konseling terkait dengan permasalahan tersebut. Banyak dari masyarakat mengetahui terkait dengan indikasi KDRT, namun mereka enggan untuk berkonsultasi dan juga memutus hal tersebut karena dinilai menyalahi aturan agama karena menurut mereka hal tersebut bagian dari perilaku tunduk pada pasangannya. Sehingga sosialisasi, edukasi sudah berjalan namun tidak ada *feedback* atau respon dari masyarakat terkait dengan program pencegahan KDRT ini.

### 3. Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu alat komunikasi dari DP3APKB terhadap masyarakat. Akun instagram @puspaga.sby aktif dalam membagikan informasi terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat terutama pencegahan KDRT. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa

indikator media sosial dalam implementasi UU PKDRT dalam mencegah KDRT sudah sesuai.



Gambar 6. Postingan Puspaga Surabaya  
Sumber data sekunder: Instagram @puspaga.sby

#### 4. Monitoring

Monitoring dalam program yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya telah dilakukan dengan cara memberikan link laporan harian kepada pada Puspaga Balai RW sehingga dapat dikontrol. Namun, monitoring kegiatan belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena peneliti tidak menemukan solusi yang solutif yang diberikan oleh DP3APPKB ketika Puspaga Balai RW terdapat mengalami kendala. Peneliti hanya menemukan bahwa ketika masyarakat RW IV Wonokromo kurang antusias terhadap program Puspaga Balai RW, pihak dari DP3APPKB hanya menyarankan para fasilitator untuk jemput bola. Menurut peneliti hal ini kurang efektif mengingat budaya di Indonesia yang kurang mendukung.

## **b. Sumber Daya**

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III menekankan pentingnya sumber daya dalam memahami dan merencanakan implementasi kebijakan. Sumber daya DP3APPKB untuk implementasi UU No.23 Tahun 2004 ini dibagi menjadi sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran (dana dan keuangan), fasilitas dan jejaring. Dalam hal ini, sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, namun terdapat perbedaan antara jumlah yang ada pada ketentuan dengan realita di lapangan. Namun bukan tanpa alasan, melainkan jumlah sumber daya manusia yang ada disesuaikan dengan keadaan di lapangan. DP3APPKB menaungi Puspaga Kota Surabaya memiliki cukup sumber daya manusia untuk menunjang berbagai programnya terkait pencegahan KDRT. Dimana DP3APPKB memiliki para staf yang sudah profesional dalam bidangnya, serta para fasilitator yang sudah mengikuti pelatihan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kota Surabaya. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana menempati posisi sentral sebagai eksekutor utama program dan kegiatan pencegahan KDRT.

Anggaran merupakan fondasi yang mendukung semua aspek implementasi, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan dukungan kepada korban. Anggaran ini diperoleh sebagai dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap implementasi UU PKDRT. Rincian anggaran

tersebut didapat dari APBD Kota Surabaya, Dana Kelurahan, dan sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat. Menyediakan tempat dan sarana untuk menyelenggarakan program dengan efektif juga menjadi poin penting dalam implementasi UU PKDRT. Fasilitas yang telah disediakan, seperti sarana dan prasarana yang telah ditetapkan pada Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW.

Begitu pula dengan jejaring, dimana DP3APPKB telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengimplementasikan UU PKDRT ini, seperti Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Hal tersebut guna menciptakan hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung implementasi yang terkoordinasi dengan baik. Dengan integrasi sumber daya tersebut, DP3APPKB memiliki landasan kuat untuk menjalankan implementasi kebijakan pencegahan KDRT secara efektif, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III.

### **c. Disposisi**

DP3APPKB memiliki peran sentral dalam mengelola aspek-aspek penting kehidupan masyarakat di tingkat lokal, sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2004. Fungsi dan tugas dari DP3APPKB meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DP3APPKB Kota Surabaya mengimplementasikan program pelatihan bagi para staf yang terlibat dalam penyelenggaraan

kebijakan di tingkat daerah. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu pemberdayaan perempuan, pencegahan KDRT, perlindungan anak, dan masih banyak lagi.

Peneliti menyimpulkan bahwa sikap pelaksanaan, pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 sudah cukup baik. Program yang diselenggarakan oleh DP3APPKB Kota Surabaya dirancang untuk membentuk disposisi yang positif di kalangan para pelaksananya, sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam melaksanakan kebijakan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dalam teori Edward III, struktur birokrasi menjadi salah satu bagian yang penting. Struktur birokrasi dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 sudah baik. Hal ini dibuktikan dalam keikutsertaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, DP3APPKB, Dinas-Dinas dan Badan-Badan Daerah, Puspaga Surabaya, Puspaga Balai RW dan Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW. Sebagaimana fungsi dari DP3APPKB dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait pencegahan KDRT. Hal ini mencakup pembuatan peraturan, pedoman, dan kebijakan lokal yang mendukung upaya pencegahan dan perlindungan. Tak hanya itu, DP3APPKB juga semestinya melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah

diimplementasikan. Evaluasi ini membantu menilai efektivitas upaya pencegahan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Puspaga Surabaya dibawah naungan DP3APPKB yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program pencegahan KDRT menjadi poros penting struktur birokrasi. Sebagaimana Puspaga Balai RW yang dibentuk oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT yang lebih dekat dengan masyarakat. Puspaga Balai RW juga bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pencegahan KDRT. Ini mencakup pembuatan materi edukasi serta langkah-langkah konkret untuk mengurangi insiden KDRT di masyarakat.

DP3APPKB, Puspaga Surabaya hingga Puspaga Balai RW pun bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, LSM, CSR dan lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

Pelaksanaan Puspaga Balai RW telah diatur dalam Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW sebagai pedoman pelaksanaan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 ini dinilai cukup baik.

### **3.2.2 Faktor Pendukung, Penghambat dan Dominan dalam Implementasi Program Puspaga Balai RW sebagai upaya pencegahan KDRT**

#### **a. Faktor Pendukung**

Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT mendapatkan dukungan signifikan dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan DP3APPKB Kota Surabaya. Kolaborasi ini memperluas cakupan dan efektivitas dalam mencapai tujuan UU No. 23 Tahun 2004.

Selain bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, peneliti juga menemukan bahwa Puspaga Surabaya memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya terutama untuk mendukung program pencegahan KDRT ini. Pemerintah Kota Surabaya pun menunjukkan bentuk dukungannya dengan memberikan dukungan anggaran, fasilitas serta menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung program Puspaga Balai RW. Komitmen dan keterlibatan dari para fasilitator dan pengurus Balai RW dalam menjalankan program juga sangat penting. Mereka berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama melibatkan diri dalam upaya pencegahan KDRT.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial pun turut menjadi bentuk dukungan Puspaga Surabaya yang mencerminkan sikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan program Puspaga Balai RW sebagai upaya pencegahan KDRT. Hal ini digunakan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi. Dengan demikian, implementasi UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT memberikan dampak positif di masyarakat.

### **b. Faktor Penghambat**

Faktor utama penghambat dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya sebagai upaya pencegahan KDRT yaitu respon masyarakat. Kurang antusias dan kurang aktifnya masyarakat dalam menyikapi program ini menjadi kendala yang amat besar. Sedangkan, semestinya masyarakat merupakan sasaran utama dalam program ini. Sehingga apabila masyarakat kurang antusias dan bahkan tidak aktif dalam program ini, bisa dikatakan bahwa program ini tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Hal seperti ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan pencegahan KDRT.

Pada kenyataannya, masih sangat amat banyak masyarakat terutama perempuan yang tidak sadar bahwa telah muncul indikasi-indikasi KDRT dalam rumah tangganya. Hal ini yang menjadikan KDRT sebagai hal wajar dalam sebuah keluarga. Alasan lain karena biasanya, masyarakat malu untuk berkonsultasi mengenai masalah yang terjadi di keluarganya. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa masalah keluarga atau bahkan masalah suami-istri sebagai aib, sehingga tidak boleh orang lain sampai tahu. Padahal tak jarang pula masalah keluarga ini berakhir dengan KDRT.

Dalam hal ini dapat dinilai bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini rendah, sehingga menghambat pelaksanaan program.

### **3.2.3 Teori Gender and Development**

Dalam kerangka *Gender and Development* (GaD), penelitian ini menunjukkan bahwa program Puspaga Balai RW berhasil memperkuat dimensi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan programnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Puspaga Balai RW secara aktif memahami dan mengakui peran serta perempuan dan laki-laki dalam konteks masyarakat setempat. Pendekatan dalam teori ini yang diterapkan dalam Puspaga Balai RW mencakup memperhitungkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, mendukung aktif perempuan di berbagai bidang, dan mempromosikan akses yang setara terhadap sumber daya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puspaga Balai RW merupakan kegiatan yang melibatkan pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Dalam pelaksanaan program Puspaga Balai RW, peran ibu-ibu sangatlah penting. Hal tersebut ditunjukkan oleh keterlibatan ibu-ibu dalam pelatihan keterampilan, mengedukasi masyarakat serta berjalannya program.



Gambar 7. Penyerahan Bantuan di Kecamatan Wonokromo  
Sumber data sekunder: Dokumen Puspaga Surabaya



**PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA  
KEPADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
OLEH KETUA TP PKK / BUNDA PAUD / KETUA FORUM PUSPA  
KOTA SURABAYA  
IBU RINI INDIYANI, S.FARM., APT.**

Kecamatan Wonocolo  
Rabu, 3 Januari 2024

Gambar 8. Bantuan Modal Usaha pada Perempuan korban KDRT

Sumber data sekunder: Dokumen Puspaga Surabaya